



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL**

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

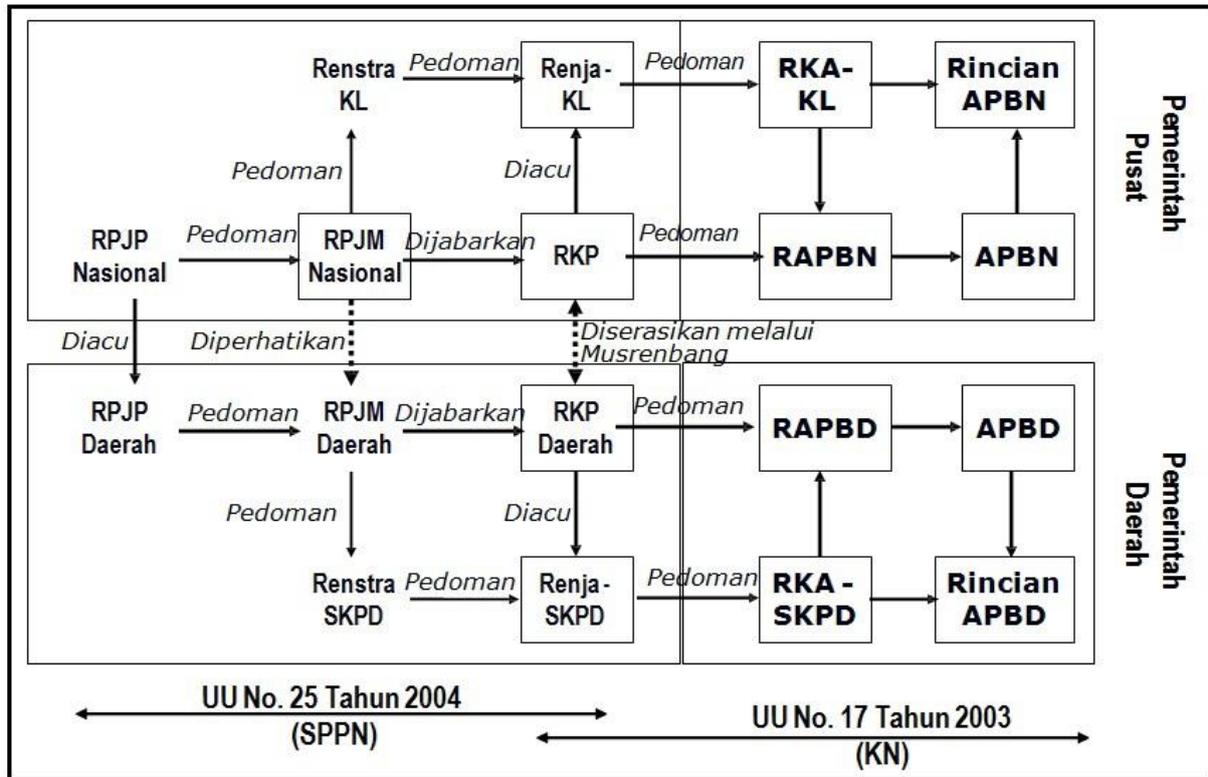
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka

pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:



1.05.0 1.201. 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		4		4				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	20		4	4	100	4	8	40
1.05.0 1.201. 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja		1		1				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5		1	1	100	1	2	40
<b>1.05.0 1.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
1.05.0 1.2.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14		14				
		Pembayara TPP		12		12				
		Jumlah Orang yang	50		50	41	100	50	50	100

		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*								
1.05.0 1.2.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		3		3				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	15		3	3	100	3	6	40
<b>1.05.0 1.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
1.05.0 1.2.05. 0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan		1		1				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	5		1	1	100	1	2	40

1.05.0 1.2.05. 0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi		235		235				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1,175		235	235	100	235	235	100
<b>1.05.0 1.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	100						
1.05.0 1.2.06. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor		12		12				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60		12	12	100	12	12	40
1.05.0 1.2.06. 0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	Laporan hasil rapat		12		12				



1.05.0 1.2.08. 0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		5		5				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	60		12	12	100	12	12	
<b>1.05.0 1.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	40						
1.05.0 1.2.09. 0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara		52		52				100

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	52		52	52	100	52	52	
1.05.0 1.2.09. 0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara		5		5				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50		50	49	100	50	50	100
1.05.0 1.2.09. 0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		1		1				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi*	1		1	1	100	1	1	100
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

	<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*</b>	<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50		10	-		10	10	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		2	20	<b>100</b>	2	2	100
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	<b>100</b>							
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>							
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui	Laporan intel kewilayahann		12		12				

	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan									
		Laporan patroli kewilayahan		12		12				
		Laporan pengamanan kewilayahan		12		12				
		Laporan pengawasan pejabat		12		12				
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan		12		12				
		Patroli kewilayahan		12		12				
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	12		300	12	100	12	12	100

		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan*								
1.05.0 2.2.01. 0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan		12		12				
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani		12		12				
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	300		300	300	100	300	300	100

		dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*								
1.05.0 2.2.01. 0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas		12		12				
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan		99		99				
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		100		100				
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	60		12	12	100	12	12	40

1.05.0 2.2.01. 0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia		100		100				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya *	500		100	1,440	100	1600	1600	320
1.05.0 2.2.01. 0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi		3		3				
		Jumlah Sarana dan Prasarana	30		30	26	100	30	30	100

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)								
1.05.0 2.2.01. 0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12		12	12	100	12	12	100
1.05.0 2.2.01. 0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12		12	12	100	2	2	17
1.05.0 2.2.01. 0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12		1	1	100	18	18	150

		yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan									
1.05.0 2.2.01. 0017	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12		12	0	0	12	0	0	
<b>1.05.0 2.2.02</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	60	12	12	24	100	12	12		60
1.05.0 2.2.02. 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas	Peserta Sosialisasi Pengawasan		100		100					

	Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup								
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada		1		1				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	12		12	12	100	12	12	100
1.05.0 2.2.02. 0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Laporan sidang		12		12				

	Bupati/Wali Kota									
		Laporan yustisi dan non yustisi		4		4				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	60		12	12	100	12	12	40
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</b>	<b>100</b>		100	<b>100</b>	100			0
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	12		12	12	<b>100</b>	12	12	100

		Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*								
2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	<b>27</b>	<b>99</b>	<b>45,44</b>	<b>97</b>		<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	248
2.22.08.2.09	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan</b>	<b>262</b>	<b>99</b>	<b>155</b>	<b>97</b>	<b>63</b>	<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	26
2.22.08.2.09.0017	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga		25		25				
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	16,975		3,875	3,875	100	5000	5000	52.28

Keterangan:

\*) (10)=(5+7+9) jika kinerja output

(10)=(9) jika kinerja outcome

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Belum adanya pedoman yang jelas tentang obyek dan mekanisme pelayanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Belum adanya pedoman yang jelas tentang obyek dan mekanisme pelayanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Belum adanya pedoman yang jelas tentang obyek dan mekanisme pelayanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terselenggaranya koordinasi secara rutin
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan dengan baik

	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya target waktu yang telah ditetapkan untuk menyusun dokumen Satpol PP
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perlunya evaluasi terkait realisasi kinerja yang telah terlaksana
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dalam sub kegiatan ini digunakan dalam hal melakukan pemberian gaji, tunjangan serta insentif bagi ASN di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dalam sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang penatausahaan Keuangan
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya kerjasama yang baik antara Satpol PP dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya pemenuhan permohonan anggota korsik untuk event Kabupaten dan untuk meningkatkan performa Satpol PP dengan giat kesemaptaan
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya kerjasama yang baik antara Satpol PP dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan yang ada
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya kegiatan rapat koordinasi yang bersifat rutin dan kebutuhan untuk koordinasi di instansi lain
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Terwujudnya koordinasi antara arsiparis dan petugas arsip di masing-masing bidang
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Adanya ketersediaan anggaran untuk fasilitasi kunjungan tamu dari dalam dan luar daerah
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya realisasi untuk pemenuhan kebutuhan alat dan perlengkapan perkantoran
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan dinas Satpol PP termasuk BBM pembayaran Pajak kendaraan dinas
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan alat dan mesin perkantoran
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya kebutuhan untuk pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan.
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*</b>	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Adanya ketersediaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan mebel di kantor
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Adanya ketersediaan anggaran untuk penyesuaian kebutuhan alat dan mesin di kantor
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Adanya target indikator kinerja utama Satpol PP yang harus tercapai
	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Perlunya giat patroli dan pengamanan Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan Pengawasan untuk menjaga Trantibum
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Adanya aduan masyarakat terkait pelanggaran trantibum
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perlunya pemberdayaan satlinmas dengan kegiatan bina suluh termasuk penanganan laka air

	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Adanya anggota Satpol PP dan Satlinmas yang perlu ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya.
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Adanya rekomendasi dari kemendagri untuk pemenuhan SPM
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Terwujudnya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Perlunya review penyesuaian SOP terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Perlunya tindakan penegakan pelanggaran perda dan perbup
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Perlunya edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perbup
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perbup
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perlunya tindaklanjut atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Perlunya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Perlunya pengembangan kapasitas dan karier PPNS
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Adanya amanah untuk membentuk kelompok jagawarga disemua Dusun di tahun 2024
	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Adanya amanah untuk membentuk kelompok jagawarga disemua Dusun di tahun 2024
	Pembinaan Jagawarga	Perlunya pemberdayaan masyarakat sesuai amanah pergub tentang dana keistimewaan dengan

	pembentukan kelompok jagawarga
--	--------------------------------

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu;
2. Optimalisasi dukungan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Optimalisasi subkegiatan pemenuhan SPM Trantibumlinmas.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Presentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan diperoleh dari Jumlah aduan yang ditangani dibagi

									dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100 %
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------

Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU yang tidak memenuhi target adalah:

a. NIHIL

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. NIHIL

2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:

a. Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Sistem pengaduan melalui media sosial dan aplikasi aduan telah mendukung dalam proses penanganan pelanggaran trantribum

b. Dengan pembentukan kelompok jagawarga di semua pedukuhan dapat menumbuhkan kembali nilai - nilai luhur, gotong royong dalam rangka mendukung penyelenggaraan trantribum;

c. Adanya dasar hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;dan

d. Kerjasama dengan mitra kerja, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan trantribum.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya program berkelanjutan kemasyarakatan peraturan daerah secara komprehensif dengan melibatkan OPD terkait dan peran Masyarakat untuk meningkatkan ketaatan Masyarakat terhadap peraturan daerah.

2. Perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat atau sekolah-sekolah.
3. Perlunya membangun budaya pengamanan mandiri oleh masyarakat melalui kelembagaan yang ada seperti Satlinmas dan Kelompok Jagawarga.
4. Perlunya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media online, seperti Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah intelijen dan PPNS masih terbatas
Terjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Trantibumlinmas untuk menunjang ketugasan personil
Mekanisme budaya kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja	

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Adanya regulasi atau produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja	Adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum namun tidak dilaporkan/dikoordinasikan
Dukungan dana keistimewaan	
Dukungan personil untuk kegiatan patroli gabungan dengan instansi terkait	Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda.
Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menciptakan ketenteraman umum dan penegakan perda	Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP

	Adanya tuntutan masyarakat untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
--	--------------------------------------------------------------------------------

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya; dan
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budayadengan melibatkan potensi masyarakat.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025					catatan penting
	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	82 Angka	11.030.515.882	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	82 Angka	9.174.368.137	
	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 persen	33.824.037	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 persen	26.607.500	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.167.262	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.377.500	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.656.775	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18.230.000	

	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 persen	9.056.822.625	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 persen	7.869.821.323	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /bulan	7.155.244,35	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /bulan	6.084.286.315	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.901.578.290	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.785.535.008	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 persen	331.186.075	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 persen	234.931.103	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	155.028.225	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 Orang	176.157.850	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 Orang	134.931.103	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100 persen	292.009.542	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100 persen	177.913.135	

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	134.878.881	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	55.908.135	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.680.661	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.010.000	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	450.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.995.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 persen	470.513.640	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 persen	365.580.608	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.513.640	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	365.580.608	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100 persen	588.617.779	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	100 persen	493.514.468	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas	52 Unit	508.731.370	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas	52 Unit	460.314.468	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	16.903.700	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	14.630.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.982.709	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.570.000	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 persen	20.000.000	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 persen	6.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000.0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.000.000	
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100 Persen	2.541.472.297	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100 Persen	3.419.177.477	

	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	100 persen	1.976.423.909	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti</b>	100 persen	2.227.262.372	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	1.087.418.211	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	1.203.669.524	
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Laporan	358.329.620	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Laporan	503.296.800	

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	407.796.383	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	375.808.548	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	104.907.695	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	120.500.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	15.972.000	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	30 Unit	4.097.500	
	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12 Dokumen	5.000.000	

			Tingkat Kabupaten/Kota					Tingkat Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	4.930.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	4.800.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	5.160.000	
	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	100 persen	564.548.388	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti</b>	100 persen	1.176.931.605	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada	12 Laporan	105.683.175	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada	12 Laporan	276.822.940	

			kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha					kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha			
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	441.865.213	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	182.726.500	
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	17.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	717.382.165	
	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</b>	100 persen	500.000	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bantul	<b>Capaian kegiatan pembinaan PPNS</b>	100 persen	14.983.500	
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat	12 Laporan	500.000	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	12 Laporan	14.983.500	

			PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	88,31 Persen	3.500.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Kab. Bantul	<b>Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga</b>	88,31 Persen	493.585.000	
	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Kab. Bantul	<b>Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan</b>	832 pedukuhan	3.500.000.000	<b>Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Kab. Bantul	<b>Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan</b>	832 pedukuhan	493.585.000	
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	5000 Orang	3.500.000.000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	5000 Orang	493.585.000	

→bagian rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

→bagian hasil analisis kebutuhan Tahun 2025 diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan analisis dilakukan

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
- PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- PN 5: Melanjtkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap penegakan Perda.
2. Implementasi penegakan perda dengan melibatkan stakeholder.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
				Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%

## **BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan tuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:



	1	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	26.607.500,0 0			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	37.206.440,0 0	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		5	1	01	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.377.500,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan	Satpol PP Kabupaten Bantul		10.083.988,0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 persen	7.869.821.323,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	9.125.145.974,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	6.084.286.315,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan	Satpol PP Kabupaten Bantul		7.155.244.335,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	234.931.103,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	359.908.410,00	
1	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
				05		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan	Satpol PP Kabupaten Bantul		170.531.047,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	177.913.135,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	323.210.497,00	
1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				06		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	55.908.135,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan	Satpol PP Kabupaten Bantul		150.411.770,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		5	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	112.010.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		167.348.727,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		5	1	06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	4.995.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	Penguatan good-governance pada berbagai tingkata	Satpol PP Kabupaten Bantul		450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

													Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	n Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	6.000.000,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	20.000.000,00	

	1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel														
		5	1	07	05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		5	1	07	06		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6.000.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	Penguatan good-governance pada berbagai tingkata	Satpol PP Kabupaten Bantul		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

													Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	n Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
	1	0	0	2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	-			100 persen	365.580.608,00		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	517.565.004,00	

	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		5	1	08	03		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	365.580.608,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		517.565.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-			100 persen	493.514.468,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemant	Satpol PP Kabupaten Bantul	-	607.479.557,00	



	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		5	1	09	06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	14.630.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		18.594.070,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		5	1	09	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	18.570.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	Penguatan good-governance pada berbagai tingkata	Satpol PP Kabupaten Bantul		25.280.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	375.808.548,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		536.626.021,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
					05	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	120.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan	Masyarakat Kabupaten Bantul		137.398.464,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



	1	0	0	2.	00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
		5	2	01	08		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				12 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
		5	2	01	15		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui				300 laporan	1.203.669.524,00	Kab. Bantul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta	Penguatan good-governance pada berbagai tingkata	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.562.400.034,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

						Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan											Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	n Pemantauan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika								
	1	0	0	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																				
		5	2	01	16	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				300 Laporan	503.296.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantauan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		504.312.582,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							



						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				30 Unit	4.097.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		17.569.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	-			100 persen	1.176.931.605,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	676.003.226,00	



						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	717.382.165,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		530.951.734,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
		5	2	02	12	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan				12 Laporan	182.726.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemant	Masyarakat Kabupaten Bantul		128.051.492,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

						Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	apan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	-			100 persen	14.983.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Anggota PPNS Kabupaten Bantul	-	500.000,00	
1	0	0	2.	00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
	5	2	03	06															

						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	14.983.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Anggota PPNS Kabupaten Bantul		500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					493.585.000,00							1.500.000.000,00		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					493.585.000,00								1.500.000.000,00	
3	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	-			88,31 Persen	493.585.000,00						-	1.500.000.000,00	

	2	2	0	5.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan	-			832 pedukuhan	493.585.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat pedukuhan	-	1.500.000.000,00	
	2	2	0	5.	00	Pembinaan Jagawarga														
							Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				5000 Orang	493.585.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemant	Masyarakat pedukuhan		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



## **BAB V.**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul,  
  
Raden Jati Bayubroto, SH., M.Hum  
NIP. 197005251990031002